

**Analisis Pencapaian Sasaran 3 Tahun 2019  
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai Indeks Kepuasan Baik	%				60	40	66.67
2	Nilai Evaluasi AKIP Kota	Predikat				A	BB	97.49
3	Nilai LPPD Kota	Predikat				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	100
4	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Predikat				WTP	WTP	100
5	Level Kematangan Smart City	Tingkat				Integrative	Integrative	100

### 1. Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM “Baik”

Pada indikator Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di atas nilai 76,50 dengan menggunakan pedoman survey PerMenpan No 14 tahun 2019 ditargetkan, sebanyak 60 SKPD atau 100% yang memperoleh capaian IKM diatas 76,50 pada Tahun 2019, terdapat 60 SKPD/Kecamatan yang melakukan pengukuran atau 98,33% memperoleh nilai IKM sama atau lebih dari 76,50. Untuk pengukuran sesuai RPJMD yaitu Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM “Baik” (minimal 83). Terdapat 24 Perangkat Daerah dengan nilai di atas 83, atau 40,00% dari target 60,00%. Sehingga capaian kinerja indikator adalah sebesar 66,67%. Secara riil jumlah SKPD yang memperoleh nilai IKM diatas 83 menurun sebanyak 7 Perangkat Daerah dibanding tahun 2018.

Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan Amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Kota Bandung telah pula mengamanatkan pelayanan publik yang berorientasi pada Kepuasan masyarakat dalam RPJMD Tahun 2018-2023 yang hasilnya diperoleh melalui melalui pengukuran kepuasan pelayanan masyarakat kota pada seluruh unit layanan SKPD.

Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat pada SKPD diperoleh rata-rata IKM Kota Bandung, SKPD yang menyampaikan data hasil survey sebanyak 60 SKPD/Unit Kerja, sebanyak 60 SKPD menggunakan metode survey kepuasan masyarakat berdasarkan PerMenpan Nomor 14 Tahun 2017.

Rekapitulasi hasil pengukuran survey kepuasan masyarakat dengan berbagai metode tersebut sebagaimana tabel berikut :

**Rekapitulasi Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Pada Perangkat Daerah  
Dari Rentang Nilai Tertinggi  
di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2019**

NO PERANGKAT DAERAH

1 Inspektorat Kota Bandung;

- 5 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
- 6 Dinas Perhubungan Kota Bandung;
- 7 Kecamatan Coblong Kota Bandung;
- 8 Kecamatan Cinambo Kota Bandung;
- 9 Kecamatan Gedebage Kota Bandung;
- 10 Kecamatan Rancasari Kota Bandung;
- 11 Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
- 12 Kecamatan Regol Kota Bandung;
- 13 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
- 14 Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung;
- 15 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
- 16 Kecamatan Cicendo Kota Bandung;
- 17 Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- 18 Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung;
- 19 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
- 20 Kecamatan Batununggal Kota Bandung;
- 21 Kecamatan Ujungberung Kota Bandung;
- 22 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kota Bandung;
- 23 Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
- 24 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
- 25 Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Bandung;
- 26 Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung;

- 27 Sekretariat Daerah
- 28 Kecamatan Cidadap Kota Bandung;
- 29 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
- 30 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung;
- 31 Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung;
- 32 Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
- 33 Kecamatan Lengkong Kota Bandung;
- 34 Kecamatan Sukasari Kota Bandung;
- 35 Kecamatan Andir Kota Bandung;
- 36 Sekretariat DPRD Kota Bandung;
- 37 Kecamatan Arcamanik Kota Bandung;
- 38 Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
- 39 Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung;
- 40 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
- 41 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
- 42 Dinas Kesehatan Kota Bandung;
- 43 Kecamatan Panyileukan Kota Bandung;
- 44 Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung;
- 45 Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
- 46 Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung;
- 47 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandung;
- 48 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan masyarakat Kota Bandung;



- 49 Kecamatan Cibiru Kota Bandung;
- 50 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
- 51 Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung;
- 52 Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung;
- 53 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
- 54 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
- 55 Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung;
- 56 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung;
- 57 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
- 58 Kecamatan Mandalajati Kota Bandung
- 59 Kecamatan Buah Batu Kota Bandung;
- 60 Kecamatan Sukajadi Kota Bandung;

Dari data tersebut di atas menunjukkan gambaran hasil penilaian IKM pada 60 SKPD/Unit Kerja di Lingkungan pemerintah Kota Bandung Tahun 2019.

Faktor pendorong pencapaian kinerja pelayanan public Kota Bandung adalah komitmen unit pelayanan public dan adanya harapan masyarakat terhadap meningkatnya kinerja pelayanan public seluruh unit pelayanan SKPD. Selain itu dukungan Ombudsman RI dalam melaksanakan penilaian kualitas pelayanan ditunjukkan melalui hasil survey independent kepatuhan standar pelayanan public.

## 2. Nilai Evaluasi AKIP Kota

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Nilai Evaluasi AKIP Kota diukur sesuai dengan Permenpan No. 12/2015 tentang Pedoman Atas Implementasi SAKIP.

Dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kota Bandung tahun 2019 adalah 78,00 atau kategori BB tidak memenuhi target A yang dicanangkan pada awal tahun rpjmd, awal target RPJMD pada tahun 2019 adalah A. Atas capaian tersebut maka kinerja akuntabilitas Kota Bandung tahun 2019 diukur dengan cara Nilai Hasil Evaluasi Tahun 2019 (78,00) dibagi dengan Nilai Terendah Point A (80,01) adalah tidak sesuai target atau 97,49%. Capaian tersebut ada penurunan sebesar 2,05 dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 80,05.

Akan tetapi bukan pula hal yang mudah dalam mengatasi masalah mendasar dalam pelaksanaan SAKIP, beberapa masalah yang dihadapi terkait hasil evaluasi SAKIP ini terdapat 2 (dua) catatan penting yang harus diperbaiki dan di implementasikan, yaitu :

1. Implementasi Sistem AKIP Pemerintah Kota Bandung selama Tahun 2019 belum terlihat kemajuan, yang ditunjukkan dengan hasil evaluasi yang terus menurun dalam 4 Tahun terakhir;
2. Beberapa catatan yang masih harus diperhatikan terkait dengan kualitas implementasi Sistem AKIP pada Pemerintah Kota Bandung, adalah:
  1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Bandung memuat indicator yang berpotensi sulit untuk diukur dan indikator kinerja yang belum cukup untuk mengukur keberhasilan sasaran;
  2. Rumusan tujuan dan sasaran pada beberapa Perangkat Daerah belum sepenuhnya berorientasi pada hasil dan belum sepenuhnya mampu menggambarkan *outcome* yang diharapkan akan dicapai;
  3. Masih dijumpai rumusan indicator kinerja pada beberapa Perangkat Daerah yang tidak memenuhi kriteria indicator kinerja yang baik, seperti indikator kinerja tidak relevan dengan tujuan/sasaran yang ingin dicapai, digunakannya indicator kinerja output pada tingkat kepala Perangkat Daerah dan indicator kinerja yang belum jelas cara mengukurnya;
  4. Masih dijumpai pada beberapa Perangkat Daerah ketidakselarasan rumusan indikator kinerja antar dokumen, seperti indikator kinerja dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja berbeda dengan indikator kinerja dalam Aplikasi e-SAKIP;
  5. Monitoring dan Evaluasi kinerja triwulanan belum berjalan sebagaimana mestinya, karena sebagian perangkat daerah tidak mengisi capaian kinerja triwulanan melalui aplikasi e-SAKIP;
  6. Laporan kinerja tingkat Pemerintah Kota Bandung belum sesuai kriteria, karena belum menginformasikan kinerja Kota Bandung secara utuh, tetapi lebih banyak berisi kompilasi dari kinerja Perangkat Daerah terkait saja. Untuk laporan kinerja tingkat Perangkat Daerah kekurangan banyak ditemui adalah laporan kinerja belum menyajikan analisis penyebab tidak tercapainya target kinerja dan pembandingan data kinerja secara memadai;
  7. Evaluasi yang dilakukan inspektorat terhadap penerapan SAKIP Perangkat daerah di

- lingkungan Pemerintah Kota Bandung, belum optimal untuk mendorong perbaikan penerapan Sistem AKIP pada masing-masing Perangkat Daerah;
8. Kompetensi sumber daya manusia yang menangani implementasi Sistem AKIP di lingkungan Pemerintah Kota Bandung masih perlu ditingkatkan lagi.

Berdasarkan Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 30 Desember 2019 Nomor : B/622/AA.05/2019 Hal : Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 diterima pada tanggal 10 Februari 2020 di Radisson Golf & Convention Center Batam, Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung memperoleh nilai 78,00 atau predikat BB akan tetapi mengalami penurunan sebesar 2,05 dari Capaian pada Tahun 2018, dengan Rincian adalah sebagai berikut :

### **Rincian penilaian evaluasi periode**

**Tahun 2018 s.d 2019**

<b>NO.</b>	<b>KOMPONEN YANG DINILAI</b>
1	Perencanaan Kinerja
2	Pengukuran Kinerja
3	Pelaporan Kinerja
4	Evaluasi Kinerja
5	Capaian Kinerja

### **Nilai Hasil Evaluasi**

### **Tingkat Akuntabilitas Kinerja**

Berdasarkan data diatas, kami sampaikan informasi uraian Rekomendasi dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan Budaya Kinerja untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti, beberapa hal sebagai berikut :

1. Melakukan perbaikan atas manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya;
2. Menyempurnakan rumusan tujuan dan sasaran seluruh Perangkat Daerah sedemikian rupa sehingga berorientasi pada hasil dan mampu menggambarkan *outcome* yang diharapkan akan dicapai;
3. Menyempurnakan rumusan indikator kinerja pada seluruh Perangkat Daerah sedemikian rupa sehingga memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, yakni *Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan Time-bound* (SMART) ;
4. Menyelaraskan rumusan indikator kinerja yang ada dalam dokumen kinerja dan anggaran dengan indikator kinerja dalam Aplikasi e-Sakip;
5. Meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi kinerja triwulanan dengan mendorong seluruh

- Perangkat Daerah mengisi capaian kinerja triwulanan melalui Aplikasi e-Sakip;
6. Meningkatkan kualitas laporan kinerja seluruh Perangkat Daerah sehingga memenuhi kriteria penyajian informasi kinerja yang baik. Selanjutnya, memanfaatkan informasi kinerja tersebut sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen, seperti penilaian kinerja dan perbaikan perencanaan;
  7. Meningkatkan kualitas evaluasi AKIP Organisasi Perangkat Daerah oleh Inspektorat Kota Bandung sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi Sistem AKIP oleh Perangkat Daerah secara signifikan;
  8. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang menangani implementasi Sistem Akip di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung secara berkelanjutan.

Bandung Tahun 2019 yang diterima di Kota Batam, salah satu Rekomendasi dimaksud harus menindaklanjuti hasil evaluasi Tahun sebelumnya. Dan Pemerintah Kota Bandung telah melakukan upaya – upaya perbaikan yang sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Cross cutting kinerja telah dilakukan dengan membuat pemetaan terhadap 12 sasaran strategis daerah yang terdapat pada Rancangan RPJMD, berdasarkan hasil pemetaan tersebut dilakukan cascading untuk menjabarkan mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran, program sampai dengan kegiatan di Perangkat Daerah untuk memastikan pencapaian target kinerja yang telah direncanakan dilaksanakan secara kolektif, terarah, efektif dan efisien.
  2. Beberapa program yang terindikasi tidak efektif untuk dijalankan, beririsan terlalu dekat antar program, tidak jelas formulasi pengukurannya serta tidak menjawab permasalahan kotadi hapuskan/tidak lagi dilaksanakan mulai Tahun 2020
  3. Aplikasi SIRA telah dikembangkan dan mengintegrasikan perencanaan dengan penganggaran.
- Pada aplikasi tersebut telah dikembangkan fitur yang dapat mengunci jenis belanja disesuaikan dengan output kegiatan.
- Mengembangkan aplikasi yang dapat mengunci program, indikator dan target tahunan sehingga ada upaya perangkat daerah untuk secara serius melakukan analisis terhadap ketepatan nomenklatur program serta memformulasikan indikatornya, mengingat perubahan hanya dapat dilakukan bersamaan dengan perubahan RPJMD
4. Upgrade aplikasi SILAKIP untuk membuat LKIP triwulan secara otomatis lebih lanjut akan terintegrasi dengan e-Monev Triwulan Bapelitbang dan capaian IKU Kepala OPD pada aplikasi e-RK BKPP Kota Bandung agar laporan triwulan dan eviden menjadi 1 kali entry saja serta Meningkatkan kapasitas aplikasi SILAKIP untuk efektifitas dan efisiensi tugas rutin pelaporan berupa penambahan menu dan keluaran berupa dokumen LKIP tahunan.
  5. Perbaikan aplikasi e-RK dilakukan dengan penajaman terhadap capaian Indikator Kinerja Individu sebagai komponen perhitungan untuk mendapatkan tunjangan kinerja.
  6. Telah dilakukan analisis mengenai clustering kelembagaan dan kinerja Perangkat Daerah, clustering kelembagaan dihitung berdasarkan bobot kelembagaan yang telah diverifikasi oleh Kemendagri, sedangkan pengukuran Kinerja dilakukan dengan :
    1. menghitung jumlah program Perangkat Daerah yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis daerah,
    2. Menghitung beban kerja
    3. Jumlah urusan yang diampu
    4. Kontribusi PD terhadap perwujudan Janji Wali kota
    5. Jumlah SPM yang harus diwujudkan
    6. Target SDGs yang menjadi beban kinerja PD
  7. Telah dilakukan analisis hasil fgd dengan Tim Penyusun RPJMD, Tim Pertimbangan kebijakan Wali kota dan Perangkat daerah terkait, dengan pembahasan sebagai berikut :
    1. Kalimat Misi 5 RPJMD berorientasi pada cara atau strategi dalam pembangunan di kota bandung

2. Mengingat bahwa proses penyusunan dokumen perencanaan memiliki prinsip antara lain : Top Down & Bottom Up, Partisipatif, Teknokratik, dan Politis.
3. Maka untuk Misi 5 Ranhir RPJMD Kota Bandung 2018 2023, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :
4. Misi 5 tetap tercantum pada Bab sebagai Misi wali kota Bandung (politis), akan tetapi mengingat LEVEL substansi misi tersebut merupakan manifestasi atas strategi/kebijakan atas sumber keuangan maka misi tersebut tidak memiliki TUJUAN, SASARAN dan TARGET (teknokratik).
5. Pengungkapan lebih lanjut tentang pembiayaan non konvensional dapat diungkapkan pada Bab 3 Ranhir RPJMD sebagai salah satu kebijakan sumber keuangan/ pembiayaan pembangunan (dasar RPJPD).
6. Pemetaan kinerja atas misi 5 tersebut langsung diungkapkan dalam Renstra PD yg secara teknis melaksanakan pencapaian kinerja bersumber dana non konvensional.

**RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)**

**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 SESUAI REKOMENDASI EVALUATOR KEMENTERIAN PAN-RB**

Berdasarkan Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 tanggal 10 Februari 2020

**RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 SESUAI HASIL EVALUASI SAKIP OLEH TIM EVALUATOR KEMENTERIAN PAN-RB TAHUN 2019**

<b>NO</b>	<b>HASIL EVALUASI KEMENPAN</b>	<b>PERBAIKAN EKSTISTENSI (telah dilaksanakan)</b>
1	Melakukan perbaikan atas manajemen kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun sebelumnya	
2	Menyampaikan rumusan tujuan dan sasaran seluruh Perangkat Daerah sedemikian rupa sehingga berorientasi pada hasil dan mampu menggambarkan outcome yang diharapkan akan dicapai	
3	Menyempurnakan rumusan indikator kinerja pada seluruh Perangkat Daerah sedemikian rupa sehingga memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, yakni <b>Spesific, Measurable, Achievable, Relevant dan Time-Bound (SMART)</b>	

- 4 Menyelaraskan rumusan indikator kinerja yang ada dalam dokumen kinerja dan anggaran dengan indikator kinerja dalam Aplikasi e-SAKIP
  
- 5 Meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi kinerja triwulanan dengan mendorong seluruh Perangkat Daerah mengisi capaian kinerja Triwulan melalui Aplikasi e-SAKIP
  
- 6 Meningkatkan kualitas laporan kinerja seluruh Perangkat Daerah sehingga memenuhi kriteria penyajian informasi kinerja yang baik. Selanjutnya, memanfaatkan informasi kinerja tersebut sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen, seperti penilaian kinerja dan perbaikan perencanaan
  
- 7 Meningkatkan kualitas evaluasi AKIP Organisasi Perangkat Daerah oleh Inspektorat Kota Bandung sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi Sistem AKIP oleh Perangkat Daerah secara signifikan
  
8. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang menangani implementasi Sistem AKIP di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung secara berkelanjutan

### 3. Nilai LPPD Kota

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah setiap tahun dan setiap akhir masa jabatan Kepala Daerah yang berfungsi sebagai wahana sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam kerangka mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah guna menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Nilai LPPD diukur dari skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. EKPPD 2018 terhadap LPPD Tahun 2017 Kota Bandung sesuai dengan Kepmendagri nomor 118-8840 Tahun 2018 adalah sebesar 3.3019 dengan kategori Sangat Tinggi (ST) dan Capaian sementara EKPPD 2019 terhadap LPPD Tahun 2018 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat nomor : LEV-657/PW10/3/2019 tanggal 7 Oktober adalah sebesar 3.4144 dengan Kategori Sangat Tinggi. Program Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 488.058.517,00,- dan Realisasi sebesar Rp. 403.927.500,00,-.

### 4. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah

Mengacu kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada BPK RI paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sampai saat ini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun 2018 sedang dalam proses penyusunan dan Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan akan diterima setelah proses pemeriksaan oleh BPK RI selesai.

Berkaitan dengan temuan BPK RI yang terkait dengan akun Aset Tetap sebagaimana tercantum dalam LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 39A/LHP/XVII.BDG/05/2018 tanggal 24 Mei 2018 sebagai berikut :

1. Aset tetap dengan Tahun Perolehan 1900, 2005 dan 2007 yang tidak dapat diyakini nilai kewajarannya sejumlah 3.334 unit dengan nilai Rp. 694.689.995.630,-. Sedang berproses tindak lanjut sejumlah 1.298 unit dengan nilai Rp.356.251.723.337,-dan sisanya sejumlah 2.036 unit dengan nilai Rp.338.438.272.293,- akan ditelusuri kembali.
2. Aset Tetap yang tidak diketahui keberadaannya sejumlah 2.489 unit dengan jumlah nilai Rp. 430.594.864.717,-. Sedang berproses tindak lanjut sejumlah 646 unit dengan nilai Rp.237.180.702.007,- dan sisanya sejumlah 1.843 unit dengan nilai Rp. 193.414.162.709,- akan ditelusuri kembali.

Dengan demikian sisa yang harus ditelusuri kembali adalah sebanyak 3.879 unit dengan jumlah nilai Rp. 531.852.435.002

### 5. Level Kematangan Smart City Kota Bandung

Kota Bandung yang berfungsi secara maksimal yang dapat mengelola berbagai sumberdayanya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan kota menggunakan solusi cerdas untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan-layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya menjadikan Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera dan agamis (Bandung Livable and Lovable City).

MODEL KOTA CERDAS (ARCHITECTURE VIEW) Dari GARUDA SMART CITY dikeluarkan oleh ITB dan dilakukan penilaian setiap dua tahun sekali dengan nama RKCI (Rating Kota Cerdas Indonesia) adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk melakukan pemetaan sehingga tiap kota mampu menjadi Kota Cerdas berdasarkan potensinya masing-masing. RKCI 2019 merupakan kegiatan pemetaan dan Rating Kota Cerdas Indonesia yang ke 3 kalinya dimulai dari tahun 2015. Dimana pada tahun 2019 Kota

Bandung mendapatkan nilai 63,14% / Integrative. Kota Bandung masuk ke 5 (lima) besar Rating Kota menuju Cerdas (Smart City) dari RKCI Tahun 2019 diselenggarakan 18 november 2019 di aula Barat Institut Teknologi Bandung.

### **Nilai Kota Bandung Tahun 2019**

#### **SUMBU X (50%)**

77,54%

38,77%

**Rating dibagi kedalam 5 tahapan dengan skala sebagai berikut**

<b>ADHOC</b>	0-20%
<b>INITIATE</b>	20-40%
<b>SCATTERED</b>	40-60%
<b>INTEGRATIVE</b>	60-80%
<b>SMART</b>	80-100%